

KERANGKA ACUAN KERJA

JUDUL.....



INSTANSI.....

TAHUN.....

KERANGKA ACUAN KERJA

JUDUL.....

A. Latar Belakang

- Dasar Hukum
- Narasi mengapa melaksanakan Kerja Sama

B. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini adalah:

1.
2.
3.

C. Lokasi

Lokasi pelaksanaan Kerja Sama ini..... dengan target Kerja Sama.....

D. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

1.
2.
3.

E. Jangka Waktu

Pelaksanaan Kesepakatan Bersama dengan
.....selamaTahun dimulai pada
Bulan/Tahun..... sampai dengan Bulan/Tahun.....

Rincian waktu pelaksanaan Kesepakatan Bersama :

| No. | Uraian | Waktu | Keterangan |
|-----|----------------------|-------|----------------------------------|
| 1. | Administrasi | | Waktu Pelaksanaan kegiatan |
| 2. | Verifikasi/penilaian | | |
| 3. | Rapat | | |
| 4. | Penandatanganan | | |

Pelaksanaan penandatanganan kesepakatan bersama antaradengandiperkirakan Bulan Tahun dan akan berakhir pada BulanTahun

F. Manfaat

Kesepakatan Bersama antara dengandiharapkan

Berikut beberapa manfaat Kesepakatan Bersama :

1.
2.
3.
4.

G. Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan

Dampak sosial dari kerja sama ini adalah :

1.
2.
3.

Dampak Lingkungan

1.
2.
3.

H. Output yang dihasilkan

Output yang dihasilkan dari Kesepakatan Bersama adalah

I. Pembiayaan

Pembiayaan yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan Kerja Sama ini bersumber pada.....

Proyeksi Rencana Pembiayaan selama 5 tahun :

(Contoh Tabel)

| Tahun | Uraian Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|--------------|------------------------|-----------------|-------------------|
| 20.. | | Rp. | |
| 20.. | | | |
| 20.. | | | |
| 20.. | | | |
| 20.. | | | |

Demikian Kerangka Acuan Kerja, Kesepakatan Bersama antaradengan

Banjarbaru, 20..

KEPALA DINAS,

NAMA.....

NIP.....

**KERANGKA ACUAN KERJA
KESEPAKATAN BERSAMA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DENGAN
PERUM BULOG WILAYAH KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2024**

J. Latar Belakang

Dampak inflasi secara umum adalah menurunnya kesejahteraan masyarakat dan stabilitas perekonomian suatu negara, saat ini inflasi masih menjadi permasalahan ekonomi yang dihindari setiap negara di dunia. Inflasi berpengaruh dalam menentukan harga barang dipasar secara keseluruhan. Negara yang sedang berkembang cenderung akan mengalami inflasi, negara dengan inflasi dibawah 3% masih diambang batas normal, tapi sebaliknya dengan inflasi yang tinggi dan tidak stabil merupakan cerminan dari ketidakstabilan perekonomian yang berakibat pada naiknya tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus di suatu negara dan berakibat pada makin tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Selain kebijakan fiscal dan moneter, cara mengatasi inflasi oleh pemerintah adalah dengan meningkatkan hasil produksi, mempermudah masuknya barang inport, menstabilkn pendapatan masyarakat (tingkat upah), menetapkan harga maksimum serta melakukan pengawasan stok, pasokan dan distribusi barang dalam daerah.

Kota Banjarbaru termasuk daerah yang terkena dampak inflasi sejak tahun 2021 setelah tahun 2019 juga menghadapi dampak Covid 19. Pengaruhnya sangat berdampak pada kebutuhan pokok masyarakat yang hamper semua mengalami kenaikan harga, daya beli masyarakat lemah dan secara umum pertumbuhan ekonomi daerah juga menurun. Pemerintah Kota Banjarbaru telah melakukan langkah-langkah

strategis dalam menanggulangi dampak inflasi daerah diantaranya monitoring harga-harga pangan dipasar modern dan pasar tradisional, menggalakkan penanaman pangan dan hortikultura termasuk lombok, bawang merah, melaksanakan pasar murah, pasar bersubsidi terhadap barang kebutuhan pokok masyarakat disemua kelurahan, kecamatan bahkan ditempat-tempat umum. Juga mengikuti zoom meeting tiap hari senin dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri yang diikuti oleh pemerintah daerah seluruh Indonesia, gubernur, bupati, walikota dan unsur pemerintahan lainnya (Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan). Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mendapatkan kebutuhan pangan pokok dengan harga yang terjangkau dan tersedia di pasar-pasar dalam jumlah yang cukup.

K. Maksud dan Tujuan

Maksud pelaksanaan kerjasama ini adalah daerah surplus menyediakan bahan pangan hasil pertanian gabah /beras bagi daerah kekurangan komoditas penyumbang inflasi bagi daerah. Sedangkan tujuan dari kerja sama ini adalah :

1. Menyediakan pasokan yang cukup untuk kebutuhan pangan masyarakat.
2. Membantu pemerintah untuk mengendalikan inflasi daerah.

L. Lokasi

Lokasi/daerah adalah Kabupaten Barito Kuala karena dianggap memiliki lahan pertanian yang cukup luas dan mampu menyediakan bahan pangan pokok khususnya padi dalam jumlah yang besar dan termasuk kabupaten sentra beras di Kalimantan Selatan.

M. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

1. Penanggulangan Inflasi Daerah
2. Pengelolaan Ketahanan Pangan Daerah
3. Pemenuhan urusan pemerintahan lainnya yang menjadi kewenangan daerah dengan mengacu pada

N. Jangka Waktu

Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Kota Banjarbaru dengan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dimulai pada Bulan Mei s/d Bulan Juli tahun 2024.

Rincian waktu pelaksanaan Perjanjian Kerjasama :

| No. | Uraian | Waktu | Keterangan |
|-----|--------|-------|------------|
| | | | |

| | | | |
|----|----------------------|--------------|--|
| 1. | Administrasi | 16 – 30 Mei | Waktu Pelaksanaan kegiatan bisa berubah waktunya, sesuai keadaan |
| 2. | Perifikasi/penilaian | 1 – 16 Juni | |
| 3. | Rapat | 14 – 30 Juli | |
| 4. | Penandatanganan | 15– 30 Juli | |

O. Manfaat

Kerjasama antara daerah yang surplus (mengalami kelebihan produksi) dengan daerah yang mengalami kekurangan dapat membawa berbagai manfaat dalam pengendalian inflasi. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya:

1. Stabilisasi Harga

Kerjasama antar daerah dapat membantu menstabilkan harga komoditas. Daerah yang surplus dapat memasok kebutuhan daerah yang defisit, sehingga harga komoditas tidak mengalami kenaikan yang drastis akibat kekurangan pasokan. Ini membantu menjaga inflasi tetap terkendali.

2. Penguatan Ekonomi Daerah

Melalui kerjasama ini, daerah yang surplus dapat memperluas pasar mereka ke daerah lain, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah tersebut. Sementara itu, daerah yang defisit mendapatkan pasokan yang cukup, yang mendukung stabilitas ekonomi lokal mereka.

3. Peningkatan Ketahanan Pangan

Dalam konteks komoditas pangan, kerjasama antar daerah membantu memastikan ketersediaan pangan yang merata. Ini sangat penting dalam menghindari lonjakan harga pangan yang dapat mempengaruhi inflasi secara keseluruhan.

4. Pengendalian Inflasi Secara Terpadu

Kerjasama antar daerah memungkinkan adanya koordinasi kebijakan yang lebih baik dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam menentukan harga patokan, menetapkan kebijakan distribusi, dan memantau pergerakan harga secara real-time.

5. Kesejahteraan Masyarakat

Pada akhirnya, manfaat utama dari kerjasama antar daerah dalam pengendalian inflasi adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Harga yang stabil dan ketersediaan

barang yang cukup memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dengan demikian, kerjasama antar daerah yang surplus dalam pengendalian inflasi adalah strategi yang penting dan efektif untuk menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

P. Analisis Dampak Sosial dan Lingkungan

Dampak sosial dari kerjasama ini adalah :

4. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Dengan adanya pasar yang lebih luas dan harga yang lebih stabil, petani di daerah surplus dapat menikmati pendapatan yang lebih konsisten dan tinggi. Ini meningkatkan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

5. Pemerataan Pembangunan

Kerjasama antar daerah membantu pemerataan pembangunan. Daerah yang sebelumnya terisolasi atau kurang berkembang dapat mendapatkan akses yang lebih baik ke pasar dan sumber daya.

6. Pengurangan Kemiskinan

Dengan meningkatnya pendapatan dan stabilitas ekonomi di daerah pedesaan, tingkat kemiskinan dapat berkurang. Akses yang lebih baik ke pasar mengurangi risiko ketidakstabilan pendapatan bagi petani.

7. Peningkatan Ketahanan Pangan

Kerjasama ini memastikan ketersediaan pangan yang merata, sehingga mengurangi ketidakpastian pangan dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, terutama di daerah yang sering mengalami kekurangan.

8. Peningkatan Solidaritas Antar Daerah

Kerjasama antar daerah dapat meningkatkan solidaritas dan kerjasama antara komunitas yang berbeda, menciptakan hubungan yang lebih harmonis dan kolaboratif.

Dampak Lingkungan

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Distribusi yang efisien dari hasil pertanian membantu mengurangi pemborosan dan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal, sehingga dampak negatif terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

5. Pengurangan Emisi Karbon

Dengan distribusi yang lebih terencana dan rute logistik yang lebih efisien, emisi karbon dari transportasi dapat dikurangi, yang membantu mengurangi dampak negatif terhadap perubahan iklim.

6. **Pengelolaan Lahan Pertanian yang Lebih Baik**

Daerah yang terlibat dalam kerjasama dapat berbagi pengetahuan dan teknologi tentang praktik pertanian berkelanjutan, yang dapat meningkatkan pengelolaan lahan dan konservasi tanah.

7. **Diversifikasi Tanaman**

Kerjasama antar daerah dapat mendorong diversifikasi tanaman, yang membantu menjaga keanekaragaman hayati dan mengurangi risiko terhadap kerentanan iklim dan penyakit tanaman.

8. **Pengurangan Limbah Pertanian**

Dengan distribusi yang efisien, limbah pertanian dari produksi berlebih dapat diminimalisir. Surplus produk dapat dikirim ke daerah yang membutuhkan, mengurangi potensi limbah yang tidak terkelola dengan baik.

Q. Output yang dihasilkan

Output yang dihasilkan dari kerjasama Pemerintah Kota Banjarbaru dan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah terpenuhinya kekurangan pangan berupa gabah/beras hasil pertanian lainnya akibat dampak inflasi.

Banjarbaru, Juli 2024

KEPALA DINAS,

.....